BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar BelakangMasalah

Era globalisasi menuntut adanya kompetisi dari beberapa negara untuk saling bersaing guna merebutkan kedudukan sebagai negara penentu dalam dunia baik dalam bidang perekonomian, sosial budaya, politik dan sebagainya.Perkembangan sumber daya manusia juga dituntut agar lebih baik karena kemajuan teknologi, perdagangan dan sebagainya ditentukan oleh sumber daya manusia selaku pelaku dan penggerak semua itu.

Sumber daya manusia merupakan aspek yang sangat penting di dalam pembangunan, disamping unsur lainnya seperti bahan, modal, dan teknologi.Pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik, apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal.Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting untuk tercapainya keberhasilan pembangunan.

Manajemen adalah fungsi yang berhubungan dengan upaya mewujudkan hasil tertentu kegiatan orang lain. Hal ini berarti bahwa sumber daya manusia mempunyai peran penting dan dominan dalam manajemen.Manajemen sumber daya manusia mengatur dan menetapkan program kepegawaian.

Peran manajemen sumber daya manusia sangat menentukan bagi terwujudkan tujuan organisasi, tetapi untuk memimpin manusia merupakan hal yang cukup sulit.Tenaga kerja selain diharapkan mampu, cakap dan terampil, hendaknya berkemauan dan mempunyai kesungguhan untuk bekerja efektif dan efisien. Kemampuan dan kecakapan akan bekerja efektif jika tidak di ikuti oleh kerja dan kedisiplinan pegawai dalam mewujudkan tujuan.

Kemampuan menunjukkan potensi seseorang untuk melaksanakan pekerjaan dan merupakan kekuatan yang mendorong seseorang untuk bekerja giat dan mengerjakan pekerjaannya.Persyaratan yang sangat mendasar bagi aparatur adalah kemampuan intelektual dengan motivasi

kerja yang tinggi sehingga tercipta kinerja aparatur yang kondusif untuk merealisasikan potensi kerja yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Manajemen sumber daya manusia keberadaannya sangat dibutuhkan oleh organisasi baik organisasi pemerintah maupun swasta. Penilaian kinerja aparatur dalam organisasi merupakan hal yang sangat penting karena akan bermanfaat untuk mengetahui efektifitas kerja organisasi sehingga tujuan organisasi tersebut akan dapat tercapai. Penilaian kinerja pegawai bagi organisasi swasta atau perusahaan belum memiliki ukuran yang baku, namun organisasi pemerintah atau instansi pemerintah sudah mempunyai aturan yang baku dalam penilaian kinerja aparatur.

Peran yang begitu besar sumber daya manusia sebagai pelaku utama dan juga merupakan *input* dari proses produksi dalam pembangunan akan tercapai apabila faktor-faktor penunjang optimalisasi peran tersebut tercapai. Salah satu faktor yang menentukan peran SDM adalah kinerja. Jika aparatur dalam organisasi atau perusahaan mempunyai kinerja yang baik, maka diharapkan akan mempunyai kontribusi positif terhadap organisasi atau perusahaan. Kinerja aparatur sangat ditentukan oleh seberapa baik pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki aparatur dan memfasilitasi penyelesaian atau pencapaian kinerja mereka, diklat berkorelasi positif dengan kinerja pegawai.

Keseluruhan aspek penilaian tersebut diibaratkan bahwa semua aparatur memiliki tingkat kemampuan dan latar belakang yang sesuai dengan tuntutan kerja sebagaimana diatur dalam TUPOKSI (Tugas Pokok dan Fungsi) dari instansi tersebut. Penilaian perananaparatur yang merupakan cara pembinaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip pembinaan personil yang tepat sesuai dengan kesepakatan bersama. Semakin kompleksnya tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat (Disnak Jabar) tersebut mengharuskan para aparaturnya untuk lebih profesional, taat hukum, rasional, inovatif, dan memiliki integritas yang tinggi serta

menjunjung tinggi etika administrasi publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun aparatur pemerintah itu sendiri.

Padahal penilaian Peranan aparatur apabila kita tinjau lebih mendalam, penilaian Perananaparaturakan dipengaruhi oleh beberapa hal yang antara lain insentif, motivasi, disiplin kerja, budaya kerja, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan, komunikasi, dan sebagainya.

Pemberian insentif merupakan imbalan yang diberikan kepada seorang pegawai telah melakukan suatu pekerjaan diluar tugas pokoknya atau melebihi target dari pekerjaan tersebut. Insentif sangat penting bagi aparatur guna merangsang seseorang untuk melakukan pekerjaan melebihi apa yang diinginkan oleh organisasi. Disamping itu insentif juga berfungsi sebagai penghargaan dari pegawai yang telah melakukan suatu pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan.

Disiplin kerja sangatlah penting dalam suatu organisasi dalammelaksanakan tugas-tugasnya guna mewujudkan tujuan organisasi tersebut.Disiplin kerja mengatur aparaturakan mentaati segala norma, kaidah dan peraturan yang berlaku dalam organisasi. Tujuan disiplin kerja ini dalam rangka memperlancar seorang aparatur dalam melaksanakan pekerjaannya agar pencapaian tujuan organisasi tepat waktu,tepat sasaran serta efektif dan efesien.

Berdasar latar belakang penulisan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti titik permasalahan dan berupaya mencari pemecahannya dengan mencoba mengangkat masalah tentang **“Peranan Aparatur Dinas Peternakan Jawa Barat (Disnak Jabar) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Masyarakat Melalui Situs *www.disnak.jabarprov.go.id*”.**

1.2 Kegunaan KKL

Kegunaan dari penulisan ini adalah :

1. Bagi kepentingan penulis,Laporan KKL ini dapat berguna untuk menambahwawasan dan pengetahuan penulis mengenai perananaparatur Disnak Jabardalam meningkatkan informasi peternakan melalui situs *www.disnak.jabarprov.go.id.*

2. Secara teoritis, penulisan ini untuk mengembangkan teori-teori yang penulis gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam usulan Laporan KKL ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan.

3. Secara praktis, diharapkan Laporan KKL ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pelayananaparatur Disnak Jabar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui situs *www.disnak.jabarprov.go.id.*

1.3 Metode Dalam KKL

1.3.1. Metode KKL

Sesuai dengan masalah yang ditulis pada Laporan KKLini, khususnya yang berhubungan dengan yang terjadi sekarang, maka dasar-dasar yang digunakan adalah dengan mencari kebenaran dalam penulisan berdasarkan suatu metode.Metode tersebut dapat lebih mengarahkan penyusun dalam melakukan penulisan dan pengamatan.

Dengan demikian, penulis dalam melakukan KKL ini menggunakan metode penulisan deskriptif. Menurut Burhan Bungin yang berjudul ”Metodologi Penulisan Kualitatif Dan Kuantitatif”. Metode penulisan deskriptif dapat diartikan sebagai berikut:

> Penulisan yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai *variable*yang timbul dimasyarakat yang menjadi permasalahannya itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun *variable* tertentu. Penulisan deskriptif dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian (Bungin,2001:124).

Berdasarkan pengertian di atas, maka metode deskriptif menggambarkan tentang kinerja aparatur Disnak Jabar dalam memberikan informasi peternakansesuai dengan keadaan yang sebenarnya berdasarkan bukti-bukti yang ada untuk dianalisa dan interpretasi terhadap data tersebut.

1.3.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengambil data penulisan dilakukan dengan langkah – langkah yang sesuai dengan keadaan atau kondisi data yang diambil yaitu:

a) Observasi

   Observasi adalah dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan maka dengan itu penulis menggunakan metode observasi.

b) Studi Pustaka

   Yaitu dengan mempelajari dan mengumpulkan data tertulis, yaitu buku – buku, peraturan dan sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

c) Wawancara

   Wawancara dilakukan tanpa menggunakan pedoman wawancara, dengan kata lain dilakukan dengan cara tidak terstruktur. Wawancara dilakukan dengan kepala Kasi dan Informasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat Ir. Rina Fajarwati.

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

1.4.1. Lokasi KKL

Penulisan ini dilaksanakan di Dinas Perternakan Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jln. Ir. H. Juanda No. 358 Bandung. Telepon (022) 2501151. Adapun judul dari masalah tentang "Peranan Aparatur Disnak Jabar Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Situs*http://www.disnak.jabarprov.go.id.*"

1.4.1.1. Gambaran Umum Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi dalam suatu lembaga atau instansi sangat diperlukan keberadaannya. Karena struktur organisasi ini dapat dijadikan pedoman dalam pembagian tugas, oleh setiap bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing agar lebih mengarah pada pelaksanaan pedoman kerja yang telah disusun sebelumnya. Jika pembagian tugas tidak jelas, maka akan menghambat dalam pengambilan keputusan dan dalam pencapaian tujuan yang sudah direncanakan.

Dinas Peternakan Jawa Barat mempunyai struktur organisasi garis dan staf, maksudnya adalah dalam setiap tingkat level organisasi dikepalai oleh seseoarang atasan yang membawahi beberapa orang aparatur. Jadi seoarang aparatur hanya bertanggungjawab kepada seorang atasan.

Pada tahun 1961 terjadi perubahan pelaksanaan kepemerintahan, yaitu penyerahan sebagian urusan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15/PD-DPRD-GR/1961, tentang Penyerahan urusan-urusan dalam lapangan kehewanan kepada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di seluruh Jawa Barat.

Untuk penyerahan urusan peternakan yang diserahan ke Kota/Kabupaten meliputi:

1. Urusan kesehatan ternak, dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu, sepanjang urusan ini belum menjadi urusan Daerah tersebut
2. Usaha-usaha tentang pemeriksaan pengangkutan hewan-hewan, memperlindungi dan mencegah serta mengawasi penganiayaan-penganiyaan hewan.

Dengan telah diserahkannya sebagain urusan lapangan kehewanan dari Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kota/Kabupaten diseluruh Jawa Barat, maka sejak saat itu terbentuk pula Jawatan Kehewanan di DT IIKabupaten/Kotamadya diseluruh Jawa Barat sebagai instansi OtonomTingkat II.Pada tahun 1968 melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 yang merubahnama /istilah Direktorat Jenderal Kehewanan pada Departemen Pertanian menjadi Direktorat Jenderal Peternakan, maka

dengan Keputusan Presiden tersebut, nomen klatur Jawatan Kehewanan disesuaikan menjadi Jawatan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Dengan meningkatnya urusan penyelenggaraan pemerintahan dan fasilitasi pembangunan, pada tahun 1975 terjadi perubahan struktur instansi otonom dilingkungan Pemerintah Provinsi, yang ditetapkanmelalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 107/A/V/18/SK/1975, tentang perubahan Jawatan (Otonomi) menjadi Dinas. Maka sejak itu Jawatan Peternakan Provinsi Daerah Jawa Barat menjadi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.

1.4.1.2. Struktur Organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan diatur melalui Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 tahun 1979, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, kemudian dengan keluarnya Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980, tentang petunjuk pelaksanaan mengenai pembentukan susunan organisasi dan tata kerja peternakan, maka struktur dinas disesuaikankembali melalui Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1983, tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Daerah Tingkat Jawa Barat, dengan sub sistem organisasi Dinas terdiri atas:

1. Kepala Dinas

Kepala Bagian Tata Usaha membawahi:

a. Subag Kepegawaian
b. Subag Perlengkapan
c. Subag Umum
d. Subag Humas

2. Sub Dinas Teknis yang terdiri atas:

a. Sub Dinas Bina Program
b. Sub Dinas Produksi
c. Sub Dinas Bina Usaha
d. Sub Dinas Kesehatan Hewan
e. Sub Dinas Penyuluhan
f. Sub Dinas Pengembangan dan Penyebaran Ternak

Untuk sub sistem tatalaksana pemerintahan mengacu kepada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, yang intinya penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan secara sentralistik (terpusat) dengan Gubernur juga merangkap sebagai Kepala Daerah, sehingga seluruh Daerah Kota/Kabupaten juga bertanggung Jawab Kepada Gubernur, dan untuk bidang peternakan melalui Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat.

Dengan terbitnya Keputusan Menteri Pertanian Nomor 803/Kpts/OT.210/12/94,tentang Penyerahan sebagain urusanPemerintahan di Bidang Pertanian kepada Pemerintah Kota/Kabupaten, untuk bidangpeternakan yang diserahkan adalah sebagai berikut:

a. Pengujian dan penerapan teknologi
b. Sumber daya lahan, Penyebaran dan pengembangan peternakan
c. Perbibitan dan silsilah ternak
d. Pakan ternak, dan tanah pengembalaan
e. Obat Hewan
f. Pembinaan alat dan mesin
g. Peredaran dan mutasi ternak
h. Kesehatan hewan
i. Pelayanan dan perijinan usaha
j. Pembinaan pemasaran
k. Pembinaan manajemen usaha tani
l. Tenaga kerja peternakan
m. Data dan statistik peternakan
n. Penyuluhan pertanian.

Sejalan dengan penyerahan sebagain urusan kepada pemerintah Kota/Kabupaten, maka struktur organisasi dinas berubah kembali, yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 1995, tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan tugas pokok menyelenggarakan sebagaian urusan rumah tangga daerah di bidang peternakan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Adapun struktur organisasinya

berubah menjadi : Kepala Dinas; Kepala Bagian Tata Usaha membawahi Subag Perencanaan, Subag Kepegawaian, Subag Perlengkapan, Subag Umum; dan 6 Sub Dinas Teknis yang terdiri atas : Sub Dinas Bina Produksi, Sub Dinas Bina Usaha, Sub Dinas Bina Kesehatan Hewan, Sub Dinas Bina Penyuluhan, Sub Dinas Bina Pengembangan dan Penyebaran Ternak serta Unit Pelaksana Teknis Dinas

Perubahan Pemerintahan yang cukup besar terjadi setelah terbitnya Undang Undang 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dari sistem pemerintahan yang sentralistik menuju pemerintahan desentralisasi, yang lebih menitikberatkan fungsi dan kewengan lepada pemerintah kabupaten dan Kota dengan maksud lebih mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Undang-undang tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan bidang pemerintahan tertentu lainnya di bidang pertanian, terdapat 12 kewenangan peternakan yang harus di laksanakan Provinsi yaitu:

1. Penetapan standar pelayanan minimal dalam bidang pertanian yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.
2. Penetapan standar pembibitan/pembenihan pertanian.
3. Penetapan standar teknis minimal RPH, Rumah Sakit Hewan dan satuan pelayanan peternakan terpadu.
4. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM aparat pertanian teknis fungsional,keterampilan dan diklat kejuruan tingkat menengah.
5. Promosi ekspor komoditas pertanian unggulan Daerah Provinsi.
6. Penyediaan dukungan kerjasama antar Kabupaten/Kota dalam bidang pertanian.
7. Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular.
8. Pengaturan penggunaan bibit unggul pertanian.

9. Penetapan kawasan pertanian terpadu berdasarkan kesepakatan dengan Kabupaten/Kota.
10. Pelaksanaan penyidikan penyakit di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota.
11. Penyediaan dukungan pengendalian eradikasi organisme pengganggu tumbuhan, hama dan penyakit di bidang peternakan.
12. Pemantauan,peramalan dan pengendalian serta penanggukangan eksplosi organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit di bidang pertanian.

Untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi maka terjadi pula penyesuaian instansi/dinas-dinas di tingkat Provinsi, dan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 15 Tahun 2000 jo No 5 Tahun 2002 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat. Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok:

Merumuskan kebijakan Operasional di bidang peternakan yang merupakan sebagian kewenangan desentralisasi Provinsi serta kewenangan yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan azas dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Adapun fungsi yang dimilikinya adalah dalam rangka:

1. Perumusan kebijakan operasional di bidang peternakan.
2. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang peternakan.
3. Fasilitasi pelaksanaan tugas di bidang peternakan meliputi program, perbibitan, pengembangan peternakan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner serta UPTD.
4. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan.

Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Wakil Kepala, 5 (lima) orang Kepala Sub Dinas, 1 (satu)orang Kepala Bagian Tata Usaha, 15 orang Kepala Seksi dan 3(tiga) orang Kepala Sub Bagian.

Selain perangkat diatas, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 Tentang

Dinas DaerahProvinsi Jawa Barat, maka Dinas PeternakanProvinsi Jawa Barat mempunyai perangkat Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) setingkat eselon III, yang terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu 5(lima) UPTD pengembangan, 2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTDpelatihan, yaitu:

1. UPTD pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Unggas Jatiwangi Kabupaten Majalengka.
2. UPTD Pengembangan Balai Perbibitan Ternak Sapi Perah Cikole Kab. Bandung.
3. UPTD Pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Perah Bunikasih Kab. Cianjur.
4. UPTD Pengambangan Balai Pengembangan Ternak Domba Margawati Kab. Garut dengan instalasi SPTD Trijaya Kab. Kuningan.
5. UPTD Pengembangan Balai Pengembangan Perbibitan Ternak Sapi Potong Kab. Ciamis.
6. UPTD Pelayanan Balai Penyidikan Penyakit Hewan dan Kesehatan MasyarakatVeteriner di Cikole Kab. Bandung dengan instalasi Check Point BanjarKab. Ciamis, Check Point Losari Kab. Cirebon, dan Laboratorium Kesehatan Hewan Kab. Majalengka.
7. UPTD Pelayanan Balai Pengujian Sarana Produksi Peternakan Cikole Kab. Bandung.
8. UPTD Pelatihan Balai Pelatihan Peternakan Cikole Kab. Bandung.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat merupakan instansi teknis daerah provinsi yang menangani bidang peternakan dalam mengkoordinasikan dan menfasilitasi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan peternakan di Jawa Barat.

Struktur Dinas seperti demikian berlangsung hingga keluarnya Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas, Kepala Dinas dibantu oleh,1 (satu) orang Sekretaris yang membawahi subid

Perencanaan, subid Keuangan dan subid Umum, 4 (empat) orang Kepala Bidang dan 12 orang Kepala Seksi dengan rincian sebagai berikut:

1. BIDANG PRASARANA DAN SARANA
    a. Seksi Penataan Kawasan
    b. Seksi Teknologi Alsin
    c. Seksi Data dan Informasi
2. BIDANG PRODUKSI
    a. Seksi Perbibitan
    b. Seksi Pakan Ternak
    c.Seksi Budidaya
3. BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET
    a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
    b. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan
    c. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. BIDANG PENGEMBANGAN
    a. Seksi Fasilitasi Usaha dan Kelembagaan
    b. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan
    c. Seksi Distribusi dan Pemasaran Hasil

Sedangkan Unit Pelaksana Teknis Daerah(UPTD) setingkat eselon III tidak mengalami perubahan yakni terdiri dari 8 (delapan) UPTD yaitu 5(lima) UPTD pengembangan, 2 (dua) UPTD pelayanan dan 1 (satu) UPTD pelatihan.

Berdasarkan data diatas, Dinas Peternakan mempunyai tabel rekapitulasi jumlah pegawai Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat dan struktur organisasi, berikut ini adalah tabel rekapitulasi dan struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat:

Tabel 1.2
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Peternakan
(Mei 2012)

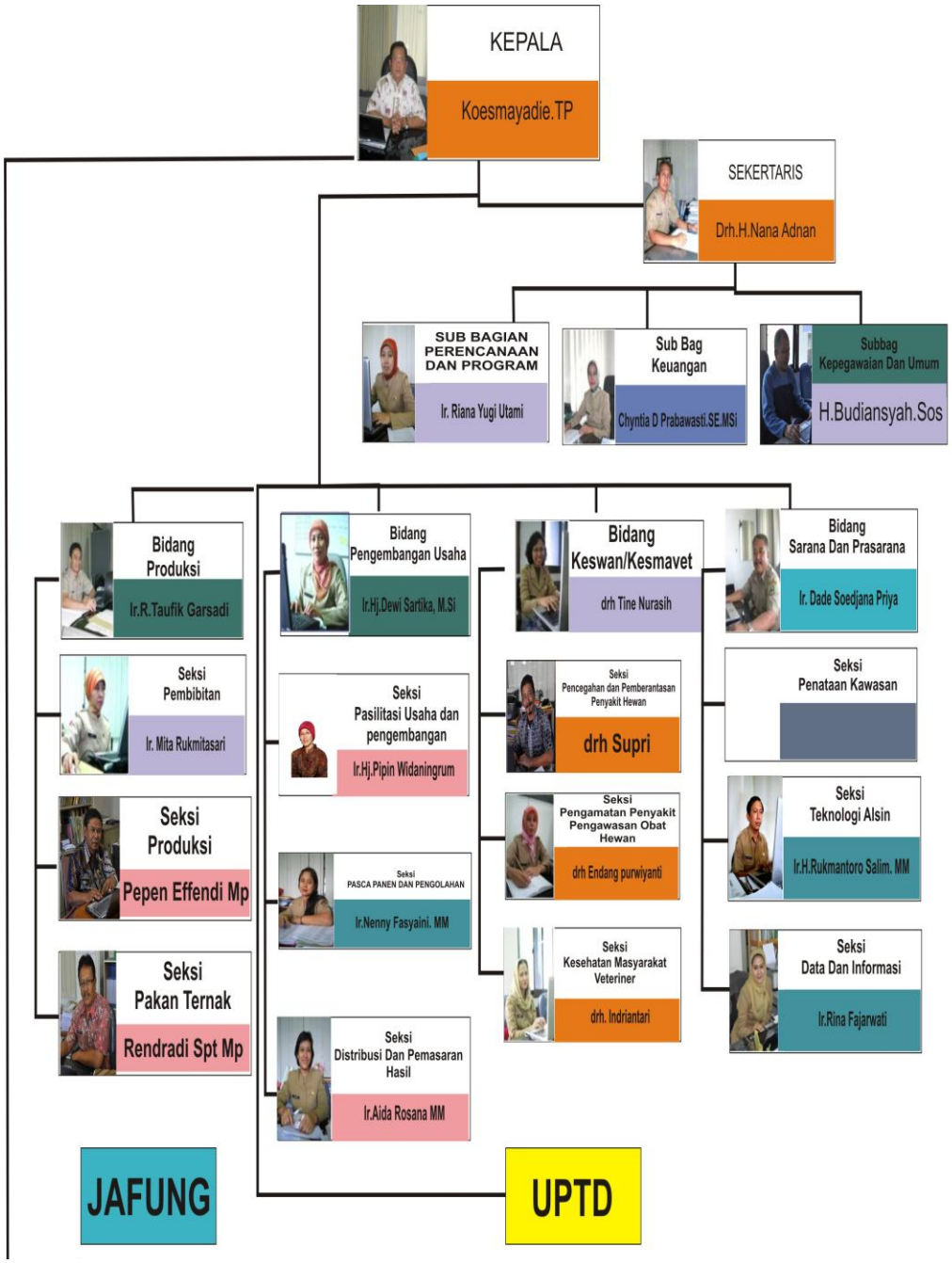
NO	UNIT KERJA	PNS	CPNS	TKK	THL	JML
1	***SEKRETARIAT*** Kepala Dinas	1	-	-	-	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1
3	Sub Bagian Perencanaan dan Program	9	-	-	-	9
4	Sub Bagian Keuangan	16	-	-	-	16
5	Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	24	-	-	-	24
	Jumlah Sekretariat	51	0	0	0	51
1	***BIDANG*** Bidang Prasarana dan Sarana	11	-	-	-	11
2	Bidang Produksi	16	1	-	-	17
3	Bidang Pengembangan Usaha	13	1	-	-	14
4	Bidang Keswan dan Kesmavet	12	-	-	-	12
	Jumlah Bidang	52	2	0	0	54
	Jumlah Pegawai Provinsi	103	2	0	0	105
1	***UPTD*** BPT SP & HMT Cikole Lembang	37	1	-	-	38
2	Balai Perbibitan & Pengembangan IBT SP Bunikasih	20	1	-	-	21
3	BPPT Unggas Jatiwangi Majalengka	24	1	-	-	25
4	BPPT Domba Margawati Garut	21	1	-	-	22
5	BPPT Sapi Potong Ciamis	20	-	-	-	20

6	Balai Pengujian Mutu Pakan Ternak Cikole Lembang	10	-	-	-	10
7	BPPPH & Kesmavet Cikole Lembang	17	-	-	-	17
8	Balai Pelatihan Peternakan	12	1	-	-	13
9	Sub PPT Domba Trijaya Kab.Kuningan	10	-	-	-	10
10	Sub Unit Pos pemeriksaan hewan Losari	9	-	-	-	9
11	Sub Unit Pemeriksaan Hewan Kota Banjar	6	-	-	-	6
12	Sub Unit Lab. Keswan Losari Kab. Cirebon	3	-	-	-	3
13	Sub Unit Pos Pemeriksaan hewan gunung Sindur	7	-	-	-	7
JUMLAH PEGAWAI UPTD		196	5	0	0	201
JUMLAH PEGAWAI DISNAK PROV. JABAR		299	7	0	0	306

Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, 2012

Dari data rekapitulasi jumlah pegawai Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat beberapa jabatan penting diduduki oleh beberapa struktur organisasi, berikut struktur organisasi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat:

Gambar 1.1
Struktur Organanisasi



Sumber: Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat, 2012

1.4.1.3. Visi dan Misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat

Visi adalah suatu cara pandang ke masa depan yang mengilhami setiap tindakan secara emosional dan memotivasi secara positif untuk mencapai kondisi yang diinginkan dimasa mendatang. Melalui Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan perubahan paradigma baru dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan semua komponen masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan..

Adapun visi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah Menjadi Dinas yang memberdayakan masyarakat peternakan demi Ketahanan Pangan asal hewan serta Kesejahteraan Masyarakat Jawa Barat.

Misi adalah suatu keamanan yang kuat suatu organisasi / lembaga dengan memperhatikan kewenangan dan tanggung jawab atas kepentingan umum (publik) guna mewujudkan kondisi dan situasi yang diinginkan pada akhir kurun waktu tertentu yang menyiratkan tujuan yang harus dicapai sebagai prasyarat terwujudnya Visi Perumusan misi harus memperhatikan pihak yang berkepentingan (stakeholders), dan memberikan peluang untuk perubahan/penyesuaian dengan tuntutan perkembangan lingkungan strategi.

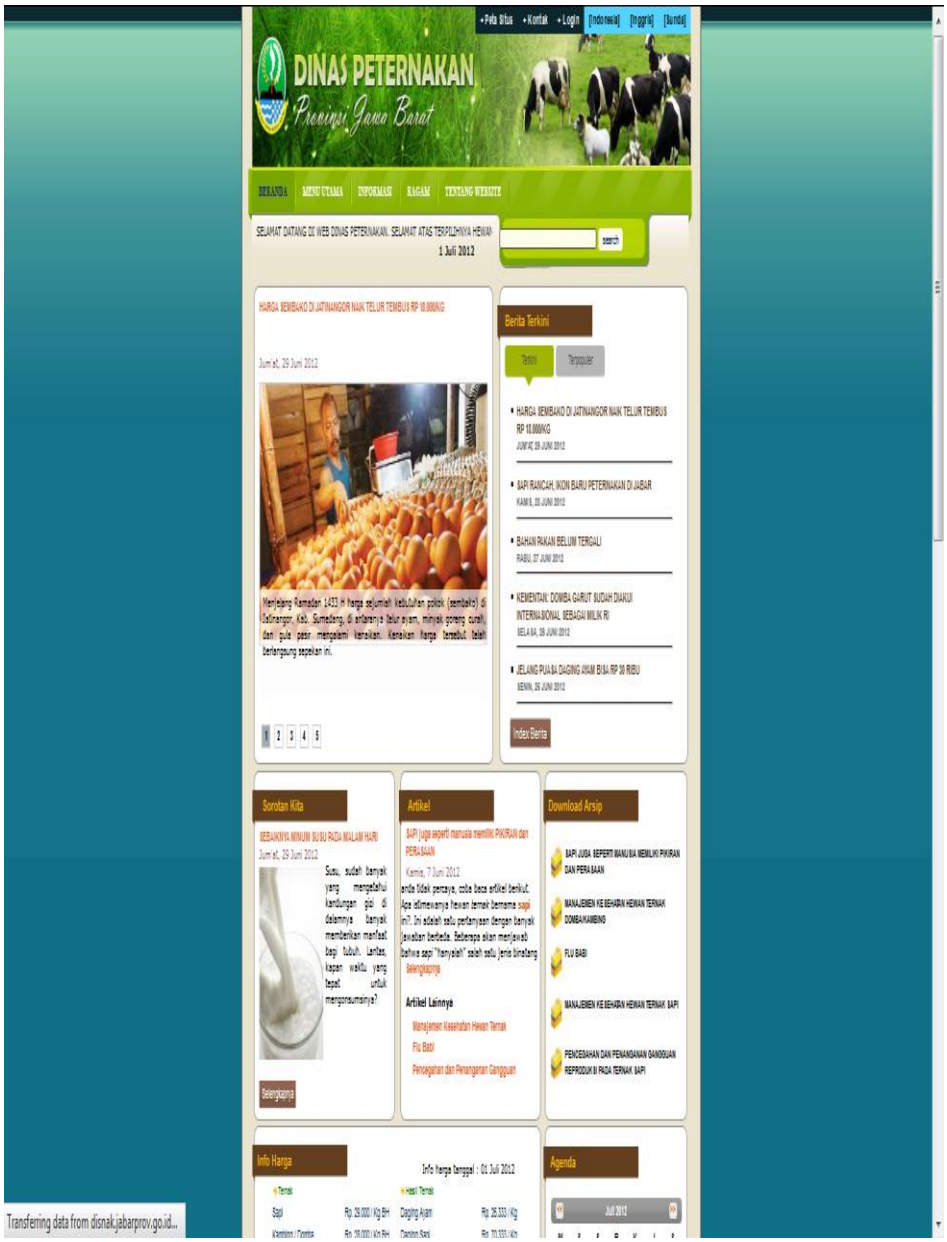
Adapun misi Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat adalah:

1. Melayani masyarakat peternakan di Jawa Barat melalui kemitraan strategis secara profesional.
2. Memfasilitasi pemangku kepentingan dalam pengembangan kawasan usaha peternakan yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan produk yang berdaya saing dan kesejahteraan bagi masyarakat; dan
3. Mendorong peningkatan terciptanya lingkungan yang kondusif bagi kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

1.4.1.4. Situs Dinas Peternakan

Dalam laporan kkl ini penulis melihat dari bagaimana peranan aparatur Dinas Perternakan dalam meningkatkan kualitas pelayan melalui website, dalam website dinas peterakan itu sendiri terdapat beberapa fitur andalan yang dapat digunakan untuk berinteraksi langsung dengan aparatur Dinas Peternakan itu sendiri. Yang mana dalam website tersebut terdapat informasi yang dapat dibutuhkan oleh masyarakat atau pengguna layanan website disnak itu sendiri. Ada tiga yang menjadi produk andalan di dalam tampilan website Dinas peternakan Provinsi Jawa Barat yang pertama produk ternak, yang mana di dalam produk ternak para pengusaha binaan disnak jabar dapat mempromosikan hasil ternak mereka ke masyarakat luar, yang ke dua forum konsultasi yang mana di dalam nya dinas peternakan provinsi jawa barat menyediakan tempat konsultasi bagi sapa saja yang membutuhkan berkaitan dengan peternakan, yang ke tiga kontak bisnis yang mana di dalam nya Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat menyediakan tempat bagi masyarakat luas untuk memasarkan hasil ternak mereka bagi sapa saja yang membutuhkan. Hal ini mempermudah masyakat untuk mengetahui berbagai informasi yang tersedia di dalam website tersebut.Selain itu, adanya website merupakan salah satu bentuk kualitas pelayanan yang di sediakan oleh Dinas Perternakan. Disinilah masyarakat bisa menilai bagai mana kualitas pelayanan yang disediakan oleh Dinas Peternakan. Berikut ini adalah tampilan dari situs Dinas Peternakan:

Gambar 1.2
Situs Dinas Peternakan Provinsi Jawa Barat



Sumber:www.disnak.jabarprov.go.id, 2012

1.4.2 Jadwal Penulisan KKL

Penjadwalan penulisan kuliah kerja lapangan sampai dengan pengumpulan laporan yang terdiri dari:

a). Penyusunan rancangan judul, bulan Mei 2012.

b). Penyusunan Laporan KKL, bulan Juni –Juli 2012.

c). Pelaksanaan KKL, bulanJuli- Agustus 2012

e). Pengumpulan Data bulan Juli - Agustus2012.

f). Penyusunan Laporan KKL September - Oktober 2012.

g). Pengumpulan Laporan KKL November 2012.

h). Seminar Laporan KKL

Tabel 1.1
Jadwal KKL

No	Waktu / Kegiatan	2012							2013
		Mei	**Jun**	**Juli**	**Agst**	**Sept**	**Okt**	**Nov**	**Jan**
1	Penyusunan rancangan judul								
2	Penyusunan Laporan KKL								
3	Pelaksanaan KKL								
4	Pengumpulan Data								
5	Penyusunan Laporan KKL								
6	Pengumpulan Laporan KKL								
7	Seminar Laporan KKL								